



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 21 -DPRD/2020

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pada tanggal 23 November 2020 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
- b. bahwa dengan telah disetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 25 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan Daerah di Purwakarta.

**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purwakarta.
Nomor : 171.1/Kep. 17 -DPRD/2020
Tanggal : 25 November 2020
Tentang : Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021.**

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN.

Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang ingin diwujudkan pada tahun 2021. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, yaitu cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi pada produk hukum yang cerdas tanggap terhadap perubahan dan berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 ini merupakan wujud dari perencanaan pembentukan peraturan daerah yang materinya bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang dihimpun atas dasar kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2021 perencanaan pembentukan peraturan daerah diharapkan dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program pembangunan baik yang bersipat fisik maupun non fisik dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2021 telah mencakup beberapa urusan pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta dibidang Kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi , perhubungan dan bidang urusan lainnya sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan maupun penyesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

A. Maksud :

1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum dibidang peraturan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

2. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.
3. Menyelenggarakan sinergi antara unit kerja yang berwenang membentuk Perundang-undangan di Kabupaten Purwakarta.

B. Tujuan :

1. Mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2021 di Kabupaten Purwakarta dalam rangka melaksanakan kebijakan daerah.
2. Mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
3. Membentuk peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

Daftar Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Raperda yang berasal dari DPRD

| NO | NAMA RAPERDA | USULAN |
|-----------|---|---------------|
| 1. | Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta | Komisi I |
| 2. | Raperda tentang Tata Cara Pembentukan Perda | |
| 3. | Raperda tentang Desa Wisata | |
| | | |
| 1. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera Dan Tera Ulang | Komisi II |
| 2. | Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm | |
| | | |
| 1. | Raperda tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana Utilitas Umum Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Jasa Serta Kawasan Industri | Komisi III |
| 2. | Raperda tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Strategis Industri Dan Pariwisata | |
| 3. | Raperda tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |
| | | |
| 1. | Raperda tentang Pondok Pesantren | Komisi IV |
| 2. | Raperda tentang Kepariwisata Berbasis Agro | |
| 3. | Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | |
| 4. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat/Baz | |

Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah (Bupati)

| NO | NAMA RAPERDA | KET |
|-----------|--|------------------------------|
| 1. | Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 | Reguler |
| 2. | Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2021 | Reguler |
| 3. | Raperda tentang APBD Tahun 2022 | Reguler |
| 4. | Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rsud Bayu Asih Kab. Purwakarta | Luncuran 2019/ Pencabutan |
| 5. | Raperda tentang Pajak Daerah | Baru |
| 6. | Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta | Baru |
| 7. | Raperda tentang Perlindungan Ibu Dan Anak | Baru |
| 8. | Raperda tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan | Baru |
| 9. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan | Baru |
| 10. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pasar | Baru |
| 11. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pasar Hewan | Baru |
| 12. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Baru |
| 13. | Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 | Luncuran 2017 |

IV. PENUTUP.

Keberhasilan pelaksanaan Propemperda ditentukan oleh persiapan-persiapan baik yang bersifat administratif, maupun penelitian, pengkajian yang komprehensif dan mendalam serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI